KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu Telepon 0451482353 Faksimili 0451 481205
Laman : http://sulteng.kemenkumham.go.id Pos-el : bidanghukumsulteng@gmail.com

Nomor : W.24–PP.02.02-272 24 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Kab. Morowali Utara.

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utara

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Pemrakarsa Nomor 100.3.2/10/HKM/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, Perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang :

1. Kebijakan Akutansi Properti Investasi;
2. Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknis pusat pelayanan keselamatan terpadu magasi;
3. Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksanan teknis pusat kesehatan hewan dan pembibitan pada dinas pertanian dan pangan daerah;
4. Peraturan pelaksanaan peraturan daerah kab. Morowali utara nomor 3 tahun 2024 tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan;
5. Tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa;
6. Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2025;
7. Tata cara pengalokasian, pembagian dan penyaluran alokasi dana desa setiap desa tahun anggaran 2025;
8. Program percepatan pembangunan desa dan kelurahan ; dan
9. Perubahan atas peraturan bupati morowali utara nomor 2 tahun 2024 tentang pemberian tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan pasal 97D Undang- Undang Nomor 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar dan putusan pengadilan serta dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Rakhmat Renaldy

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi